



Katalog: 9102067



Potensi USAHA MIKRO KECIL



BADAN PUSAT STATISTIK



— Potensi —
**USAHA
MIKRO
KECIL**



POTENSI USAHA MIKRO KECIL

No. ISBN: 978-602-438-212-4

No. Publikasi: 03220.1814

No. Katalog: 9102067

Ukuran Buku: 17,6x25 cm

Jumlah Halaman: vi + 26 halaman

Naskah: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Gambar Kulit: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Gambar: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar



Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016-Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016-Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

Jakarta, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Suhariyanto



Daftar Isi

KATA PENGANTAR _____	iii
DAFTAR ISI _____	v
PENDAHULUAN _____	vi
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI INDONESIA _____	1
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK _____	5
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA _____	9
PELAKU UMK PERLU MENINGKATKAN KAPABILITAS _____	15
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN _____	19
PROSPEK DAN KENDALA USAHA _____	23

Pendahuluan

Dunia usaha Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016-Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha nonpertanian di Indonesia. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Indonesia lebih dari 59 juta orang atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.

UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI INDONESIA

Bagian

1

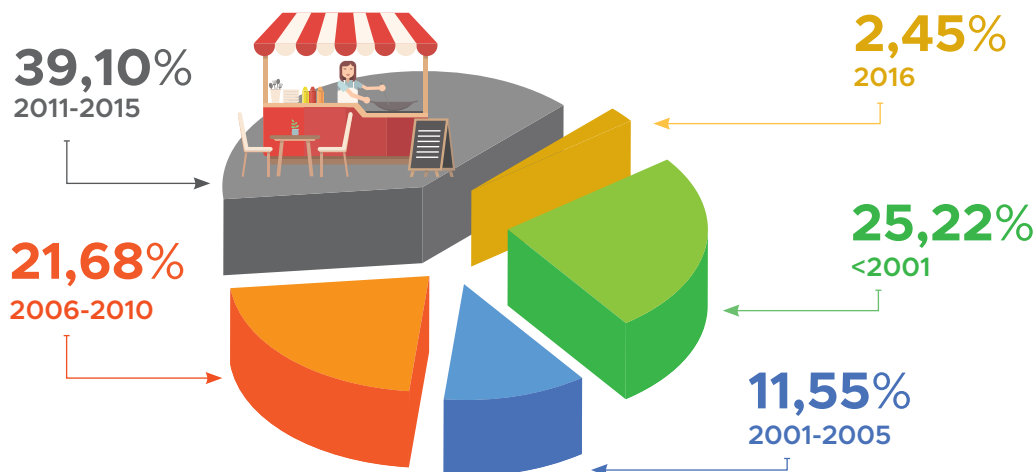
UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah. Oleh sebab itu, mayoritas UMK di Indonesia beroperasi secara komersil kurang dari 10 tahun.

Persentase UMK di Indonesia mencapai 98,68 persen dari total jumlah usaha di Indonesia. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah hampir mencapai 50 persen. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan usaha Industri Pengolahan (Kategori C) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing lebih dari 16 persen.

Pulau Jawa dengan jumlah penduduk hampir setengah penduduk Indonesia masih menjadi konsentrasi UMK. Jumlah UMK di pulau ini mencapai lebih dari 60 persen. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan jumlah UMK tertinggi di Indonesia. Sementara provinsi lain di luar Jawa dengan jumlah UMK yang besar adalah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

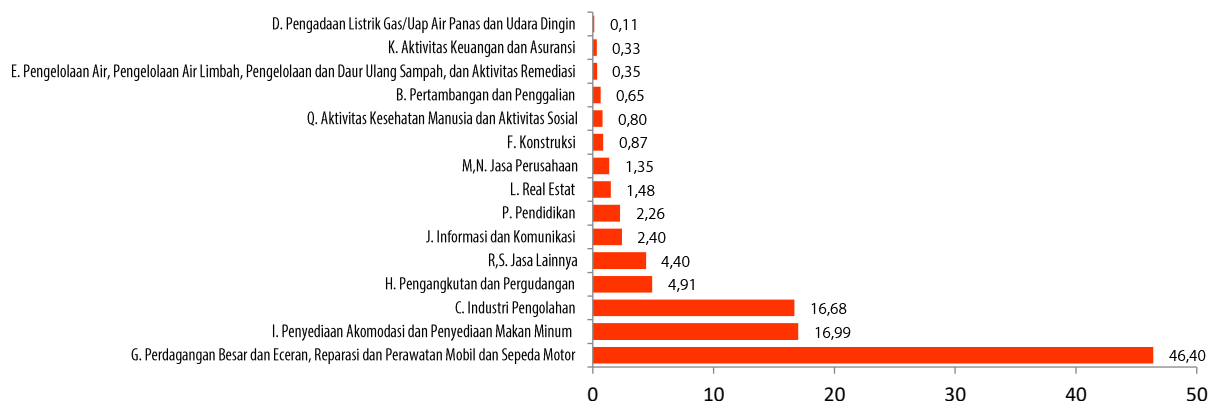
**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
INDONESIA**

Gambar 1
Persentase Jumlah UMK Menurut Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 2
Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 1
Persentase UMK Menurut Pulau, 2017

Pulau	Persentase
Sumatera	18,63
Jawa	60,74
Bali dan Nusa Tenggara	5,66
Kalimantan	5,13
Sulawesi	8,12
Maluku dan Papua	1,72
Total	100,00

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK**

Bagian

2

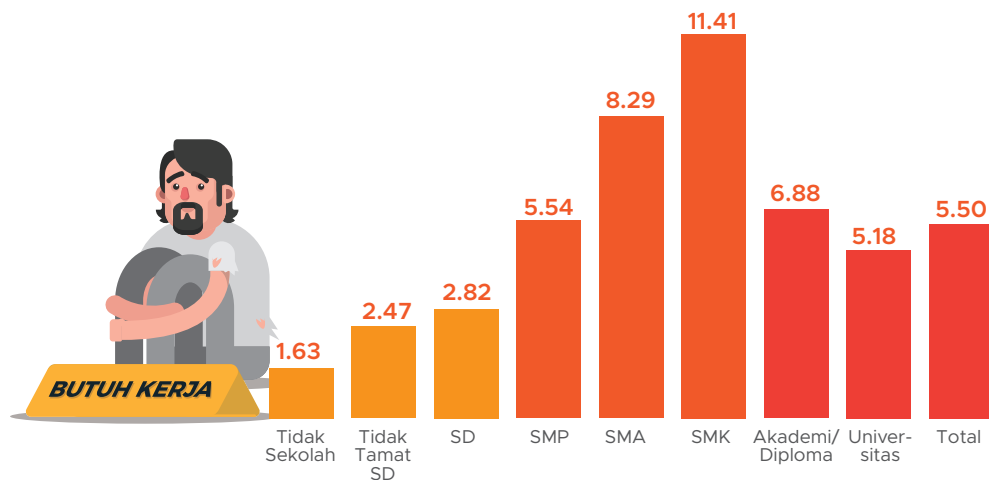
Jumlah UMK yang sangat besar di Indonesia tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas 2017, pengangguran di Indonesia mencapai 5 persen, terbanyak pada lulusan SMK yang mencapai lebih dari 11 persen. Tingginya kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di Indonesia, salah satu disebabkan rendahnya keahlian soft skill lulusan SMK khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji. Selain SMK, pengangguran juga banyak terjadi pada lulusan SMA yang mencapai 8 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran cukup banyak terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah.

Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016-Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap tiga per empat tenaga kerja nonpertanian di Indonesia, atau mencapai 59 juta orang.

Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mencapai lebih dari sepertiga dari tenaga kerja pada UMK secara keseluruhan. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK. Secara-rata-rata per usaha, aktivitas Konstruksi (Kategori F) dan Pendidikan (Kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 10 pekerja per usaha. Namun secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Indonesia hanya sebesar 2 pekerja per usaha.

**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK**

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, Agustus 2017

Gambar 4
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 2
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian
Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2017

Kategori Lapangan Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
B. Pertambangan dan Penggalian	170.004	376.711	2
C. Industri Pengolahan	4.348.459	11.707.339	3
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	29.928	53.538	2
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	91.541	182.817	2
F. Konstruksi	225.795	2.161.410	10
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	12.097.326	22.493.987	2
H. Pengangkutan dan Pergudangan	1.281.250	1.684.037	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.431.154	8.530.342	2
J. Informasi dan Komunikasi	625.772	977.381	2
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	86.266	406.598	5
L. Real Estat	385.491	507.937	1
M, N. Jasa Perusahaan	352.936	1.055.068	3
P. Pendidikan	590.423	5.873.101	10
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	209.048	893.338	4
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	1.148.296	2.363.281	2
Total	26.073.689	59.266.885	2

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**PENGELOLAAN
UMK
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3

UMK di Indonesia memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, bantuan pemasaran, pengadaan bahan baku, dan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari data SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukum dan penggunaan teknologi. Di Indonesia, jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi yaitu mencapai lebih dari 90 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya

bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, kurang dari 10 persen UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 7 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Di antara sektor nonpertanian di Indonesia, UMK Aktivitas Pendidikan dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan usaha, penggunaan internet, dan penggunaan komputer. Sementara dari aspek menjalin kemitraan, hampir semua kategori belum menjalin kemitraan secara optimal.

Gambar 5
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 7
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 8
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 3

Persentase UMK yang Berbadan Usaha, Menggunakan Komputer, Menggunakan Internet dan Menjalिन Kemitraan Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2016

Kategori Lapangan Usaha	Berbadan Usaha	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet	Menjalिन Kemitraan
B. Pertambangan dan Penggalian	1,71	0,46	1,69	3,92
C. Industri Pengolahan	4,46	3,46	7,26	9,73
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	9,74	52,73	56,27	22,45
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	3,42	2,37	3,63	8,15
F. Konstruksi	19,62	20,08	22,13	13,78
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,63	3,50	7,21	7,12
H. Pengangkutan dan Pergudangan	4,28	2,45	7,50	4,23
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2,45	1,61	4,74	2,61
J. Informasi dan Komunikasi	3,34	26,31	38,42	10,87
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	63,84	53,26	34,49	15,99
L. Real Estat	2,00	1,75	4,32	0,65
M, N. Jasa Perusahaan	14,65	35,19	33,79	13,30
P. Pendidikan	73,63	65,57	56,84	14,23
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	54,05	25,46	29,36	16,67
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	4,63	8,75	15,33	4,96
Total	6,55	6,22	9,76	6,95

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



**PELAKU
UMK
PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

Bagian

4

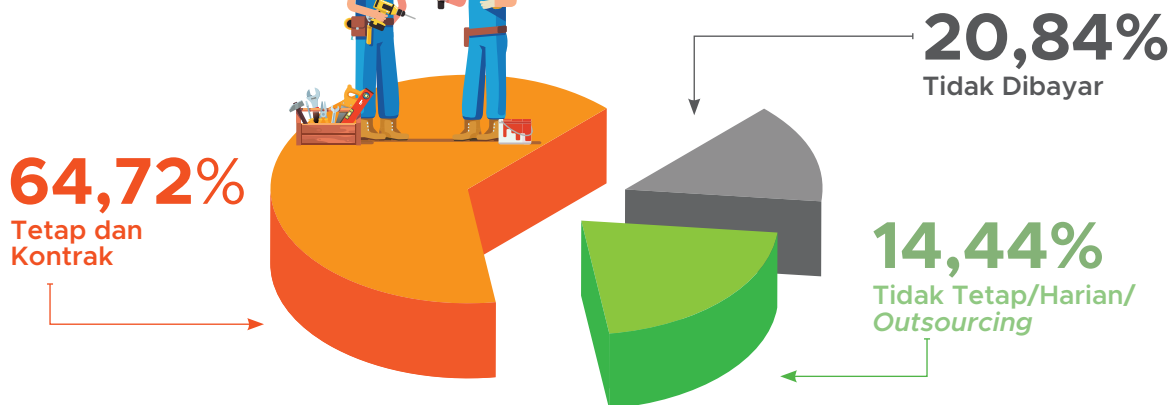
Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun, sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan sekitar 21 persen UMK dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Kategori yang paling banyak dibantu buruh tidak dibayar adalah aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G).

Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 43 persen. Meskipun masih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya stereotipe bahwa laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga bahwa UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Lebih dari 40 persen pengelola berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Pengelola dengan pendidikan SMA dan SMK juga cukup besar mencapai 30 persen. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini, misalnya dengan memberikan pelatihan. Sayangnya, Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa UMK yang pekerjanya pernah mengikuti pelatihan hanya 4,11 persen.

**PELAKU
UMK
PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

Gambar 9
Persentase UMK Nonpertanian
Menurut Status Pekerja, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 10
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 11
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 4
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Status Pekerja, 2016

Kategori Lapangan Usaha	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/Harian/ Outsourcing	Tidak Dibayar
B. Pertambangan dan Penggalian	61,54	25,40	13,06
C. Industri Pengolahan	52,53	25,80	21,66
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	73,32	4,59	22,10
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	66,98	15,14	17,88
F. Konstruksi	26,60	72,87	0,53
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	64,95	7,75	27,30
H. Pengangkutan dan Pergudangan	83,87	9,25	6,87
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	65,48	6,00	28,52
J. Informasi dan Komunikasi	72,97	2,81	24,22
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	82,80	4,97	12,23
L. Real Estat	79,09	2,23	18,68
M, N. Jasa Perusahaan	61,02	27,99	10,99
P. Pendidikan	87,49	9,54	2,97
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	84,19	7,57	8,24
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	69,71	18,69	11,60
Total	64,72	14,44	20,84

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

Bagian

5



KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif meskipun beberapa usaha dipandang mengalami penurunan. Lebih dari seperempat pengusaha UMK di Indonesia menyatakan bahwa keuntungan mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, sektor UMK secara nasional mampu menghasilkan omset/pendapatan mencapai lebih dari Rp 5 ribu triliun.

Selain laba usaha, rasio pengeluaran terhadap pendapatan (*cost to income*) juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada tabel 5 dapat terlihat bahwa UMK di Provinsi Sulawesi Utara adalah yang paling *profitable* di Indonesia dengan rasio 0,49. Sektor UMK di provinsi ini mampu mengais keuntungan hingga nyaris dua kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, rasio pengeluaran tertinggi ada di provinsi Jawa Tengah dengan rasio 0,65.

Jika dicermati lebih jauh menggunakan kategori lapangan usaha, Kategori L (Real Estat) dan G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,28 dan 0,35. UMK pada kategori-kategori tersebut mampu mendulang pendapatan hingga sekitar tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sedangkan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi ada pada Kategori Komunikasi dan Informasi dengan rasio mencapai 0,79.

Namun demikian, Kategori, L, dan G bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja yang tertinggi. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial memiliki nilai balas jasa pekerja tertinggi, yaitu sekitar 28 juta per pekerja. Selanjutnya, Kategori F (Konstruksi) dan Kategori P (Pendidikan) memberikan balas jasa lebih dari 20 juta per pekerja.

Tabel 5
Peta Sebaran UMK menurut Kinerja Keuangan Tertinggi dan Terendah Di Masing-Masing Pulau, 2017

Pulau	Terendah	Banyaknya Usaha	Rasio Pengeluaran Terhadap Pendapatan	Tertinggi	Banyaknya Usaha	Rasio Pengeluaran Terhadap Pendapatan
Sumatera	Kep. Bangka Belitung	124.721	0,55	Aceh	422.469	0,63
Jawa	Jawa Timur	4.569.822	0,51	Jawa Tengah	4.105.917	0,65
Bali Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Timur	430.312	0,57	Nusa Tenggara Barat	580.168	0,61
Kalimantan	Kalimantan Utara	51.844	0,53	Kalimantan Selatan	461.762	0,60
Sulawesi	Sulawesi Utara	292.122	0,49	Sulawesi Tenggara	279.421	0,61
Papua	Maluku	147.698	0,53	Maluku Utara	80.219	0,61

Catatan:

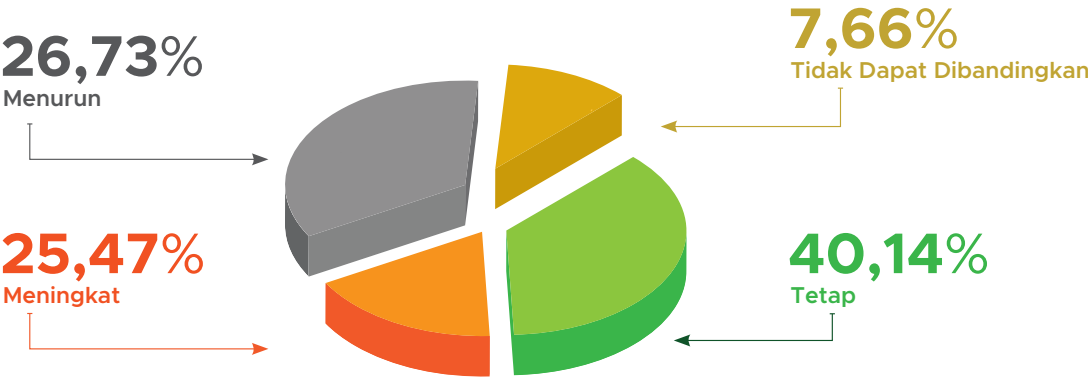
Rasio pengeluaran terhadap pendapatan menunjukkan tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin menguntungkan atau semakin baik kinerja keuangannya

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi se-indonesia

Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan terendah se-indonesia

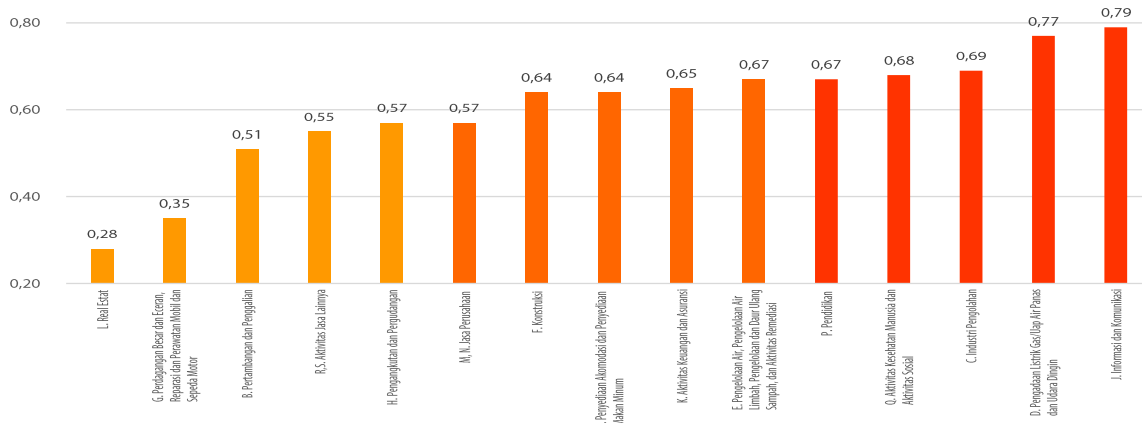
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 12
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 13
Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan menurut Kategori Lapangan Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 6
Balas Jasa dan Upah Per Pekerja UMK Nonpertanian Selama Setahun Menurut Kategori Lapangan Usaha (Ribu Rupiah), 2017

Kategori Lapangan Usaha	Balas Jasa
B. Pertambangan dan Penggalian	17.607
C. Industri Pengolahan	12.031
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	13.221
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	14.265
F. Konstruksi	23.537
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	14.286
H. Pengangkutan dan Pergudangan	16.188
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	14.166
J. Informasi dan Komunikasi	11.020
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	17.878
L. Real Estat	13.259
M, N. Jasa Perusahaan	13.148
P. Pendidikan	23.233
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	28.337
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	12.870
Total	16.717

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

PROSPEK DAN KENDALA USAHA

Bagian

6



RPJMN 2015-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pengusaha UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar 43 persen.

Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. UMK di Indonesia 78 persen memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Adanya pesaing dan permasalahan permodalan/likuiditas merupakan kendala utama yang dihadapi. Masing-masing sekitar 60 persen pengusaha UMK menyatakan memiliki kendala tersebut.

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan

kapasitas usahanya. Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMKK sebetulnya sudah sangat terbuka. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKK (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015). Namun hanya sekitar 12 persen usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Alasan UMK tidak mengajukan kredit melalui lembaga keuangan utamanya adalah karena 47 persen merasa belum perlu untuk mengajukan kredit. Sedangkan bagi pengusaha yang membutuhkan kredit namun belum mengajukan/mendapatkan kredit adalah karena alasan bunga tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, prosedur sulit, dan usulan ditolak.



**PROSPEK
DAN KENDALA
USAHA**

Gambar 14
Persentase UMK Menurut Prospek UMK Tahun 2018



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 15
Persentase UMK Yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala (Persen), 2017



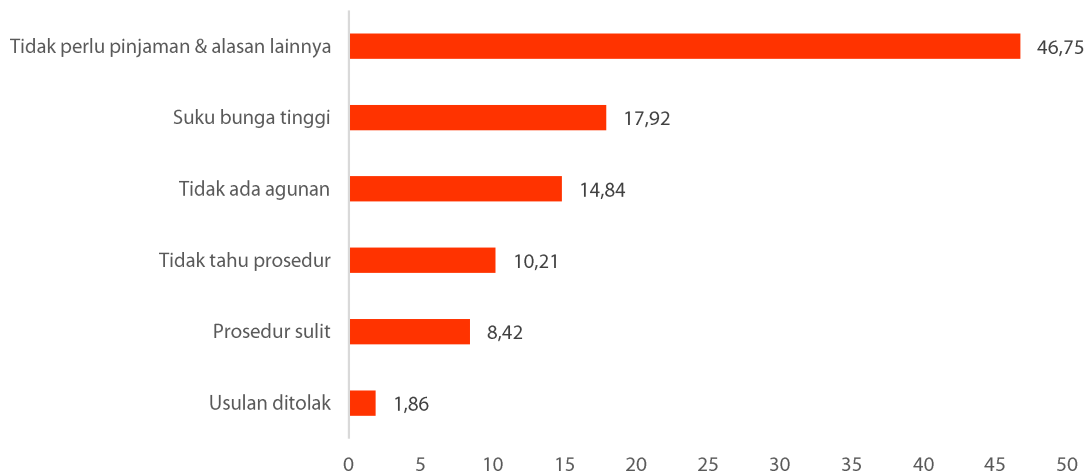
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 16
Persentase UMK Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 17
Persentase UMK yang Tidak Memperoleh/Mengajukan Kredit dari Lembaga Keuangan Menurut Alasannya, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id